



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 71 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi RENSTRA Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1 ) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1 ) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 19 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2007.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
- c. BAB III : Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2007;
- d. BAB IV : Rencana Kerja;
- e. BAB V : Ringkasan Pendanaan;
- f. BAB VI : Kaidah Pelaksanaan;
- g. BAB VII : Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 merupakan penjabaran tahun ke 4 dari Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008.

**Pasal 5**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2006

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

**PUDJO KISWANTORO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 71**

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR : 71 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2006

PAGU INDIKATIF BIDANG DAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2007  
 PROVINSI JAWA TENGAH

| No       | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                                      | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN           |               | SKPD PENGAMPU                        |
|----------|--|--|--------------------|---------------|--------------------------------------|
|          |  |  | (Ribuan Rp)        | (Prosen)      |                                      |
| 1        | 2  | 3  | 4                  | 5             | 6                                    |
|          | <b>BIDANG PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>             |  | <b>607,527,109</b> | <b>47.66%</b> |                                      |
| <b>A</b> | <b>PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN &amp; KETENAGAKERJAAN</b>          |  | <b>13,293,000</b>  | <b>1.04%</b>  |                                      |
| <b>1</b> | <b>Kependudukan</b>  |  | <b>1,620,000</b>   | <b>0.13%</b>  |                                      |
|          | Pengembangan dan keserasian Kebijakan Kependudukan             | 1. Mengembangkan kajian penyediaan data dan informasi kependudukan,<br>2. Meningkatkan kemampuan aparat pengelola administrasi kependudukan serta mengembangkan kebijakan pranata hukum                                | 620,000            | 0.05%         | Setda                                |
|          | Pelayanan Keluarga Berencana                                   | 1. Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta<br>2. Mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas                        | 1,000,000          | 0.08%         | Setda                                |
| <b>2</b> | <b>Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian</b>                    |  | <b>11,673,000</b>  | <b>0.92%</b>  |                                      |
|          | Pertuasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja                    | 1. Mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja di berbagai bidang<br>2. Menyediakan pelayanan informasi bursa kerja.   | 4,806,700          | 0.38%         | Disnaker                             |
|          | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja            | Mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelatihan kerja  | 3,734,600          | 0.21%         | Disnaker                             |
|          | Perindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja              | Meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha   | 3,131,700          | 0.18%         | Disnaker, Setda                      |
| <b>B</b> | <b>PENDIDIKAN, IPTEK DAN AGAMA</b>                             |  | <b>495,799,422</b> | <b>38.90%</b> |                                      |
| <b>1</b> | <b>Pendidikan</b>  |  | <b>409,355,179</b> | <b>32.12%</b> |                                      |
|          | Perluasan dan peningkatan akses jangkauan pelayanan pendidikan | 1. Memperluas jangkauan dan daya tampung<br>2. Memberi kesempatan bagi kelompok kurang beruntung (terpencil, kumuh, miskin, daerah bermasalah, anak jalanan) untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal | 62,146,420         | 4.88%         | Dinas P dan K<br>Setda, Dispartanian |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                                 | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN    |          | SKPD PENGAMPU        |
|----|---|--|-------------|----------|----------------------|
|    |   |  | (Ribuan Rp) | (Prosen) |                      |
| 1  | 2   | 3  | 4           | 5        | 6                    |
|    | Peningkatan kualitas siswa                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas siswa dan tamatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan relevansi kebutuhan dunia kerja.</li> <li>2. Memberi penghargaan bagi siswa berprestasi dalam bentuk pemberian biasiswa</li> <li>3. Meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk meningkatkan prestasi akademik</li> </ol> | 15,575,000  | 1.22%    | Dinas P dan K        |
|    | Peningkatan dan Pengembangan Kurikulum                    | Mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pasar kerja / industri   | 5,032,045   | 0.39%    | Dinas P dan K        |
|    | Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan   | Meningkatkan kualitas, kualifikasi, tingkat kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan.  | 118,229,950 | 9.28%    | Dinas P dan K        |
|    | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan dan merawat prasarana dan sarana pendidikan yang memadai</li> <li>2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran</li> </ol>   | 182,405,764 | 14.31%   | Dinas P dan K, Setda |
|    | Fasilitasi pendidikan tinggi                              | Membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi   | 6,900,000   | 0.54%    | Dinas P dan K        |
|    | Peningkatan Kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri | Menyelenggarakan kerjasama sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan   | 1,492,000   | 0.12%    | Dinas P dan K        |
|    | Peningkatan satuan pendidikan yang bertaraf internasional | Menyediakan layanan pendidikan bertaraf internasional dan inovasi pendidikan sesuai kebutuhan global   | 1,567,000   | 0.12%    | Dinas P dan K        |
|    | Penataan sistem dan kelembagaan pendidikan                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat</li> <li>2 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan</li> <li>3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan</li> </ol>  | 16,007,000  | 1.26%    | Dinas P dan K        |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                                      | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN          |              | SKPD PENGAMPU                             |
|----|--|--|-------------------|--------------|---|
|    |  |  | (Ribuan Rp)       | (Prosen)     |   |
| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5            | 6   |
| 2  | <b>Kebudayaan</b>  |  | <b>28,613,943</b> | <b>2.24%</b> |   |
|    | Pengemb pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman | Menyelamatkan, melestarikan dan mengembangkan serta mendayagunakan warisan budaya bangsa.  | 11,135,000        | 0.87%        | Dinas P dan K                             |
|    | Pengembangan pembinaan kesenian dan nilai-nilai budaya         | Mendorong dan mengembangkan kesenian daerah, memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa serta meningkatkan kualitas budaya masyarakat.   | 8,268,977         | 0.65%        | Dinas P dan K, Setda, Kantor Perwakilan   |
|    | Pengembangan kebahasaan, kesusasteraan dan kepustakaan         | 1. Mendorong pengembangan bahasa dan sastra daerah.<br>2. Mendayagunakan dan mengembangkan perpustakaan sebagai pusat informasi ilmu pengetahuan<br>3. Mewujudkan pelestarian pengembangan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya bangsa | 8,188,600         | 0.64%        | Dinas P dan K, Kantor Perpustakaan        |
|    | Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME             | Meningkatkan pembinaan kepada organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai budaya spitirual dan tidak mengarah pada pembentukan agama baru.   | 1,021,366         | 0.08%        | Dinas P dan K, Setda                      |
| 3  | <b>Kepemudaan</b>  |  | <b>5,219,921</b>  | <b>0.41%</b> |   |
|    | Peningkatan Pemberdayaan pemuda                                | Melindungi segenap generasi muda dari penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan miras dan NAPZA serta penyakit sosial masyarakat lainnya.   | 1,759,055         | 0.14%        | Dinas P dan K, Setda                      |
|    | Pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif pemuda          | Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.   | 519,844           | 0.04%        | Dinas P dan K, Setda                      |
|    | Pembinaan lembaga/organisasi kepemudaan                        | Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya.   | 2,941,022         | 0.23%        | Dinas P dan K, Setda, Badan Kesbanglinmas |

| No       | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                               | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN          |              | SKPD PENGAMPU        |
|----------|---|--|-------------------|--------------|----------------------|
|          |   |  | (Ribuan Rp)       | (Prosen)     |                      |
| 1        | 2   | 3  | 4                 | 5            | 6                    |
| <b>4</b> | <b>Keolahragaan</b>                                     |  | <b>42,356,379</b> |              |                      |
|          | Pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga      | Meningkatkan pencapaian dan kesinambungan prestasi olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat.   | 35,328,695        | 2.77%        | Dinas P dan K, Setda |
|          | Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga   | Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi olahraga di daerah  | 6,218,234         | 0.49%        | Dinas P dan K, Setda |
|          | Pemasyarakatan olah raga dan kesegaran jasmani          | Mendorong tumbuhnya pola hidup sehat dalam masyarakat melalui olahraga   | 809,450           | 0.06%        | Dinas P dan K        |
| <b>5</b> | <b>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>                   |  | <b>3,240,000</b>  | <b>0.25%</b> |                      |
|          | Pengembangan sumberdaya IPTEK                           | Meningkatkan penguasaan penelitian dasar dan penelitian terapan, pengembangan rekayasa dan pengembangan teknik budidaya                                    | 800,000           | 0.06%        | Balitbang            |
|          | Penelitian dan Pengembangan                             | Mendorong penyediaan produk IPTEK yang berkualitas baik dari segi lingkungan strategis, ilmiah maupun tingkat penerapannya.                                | 1,990,000         | 0.16%        | Balitbang            |
|          | Perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI) | Memfasilitasi pada para penemu teknologi dan inovasi untuk memperoleh perlindungan hukum berupa hak atas kekayaan intelektual atas penemuan dan inovasinya | 150,000           | 0.01%        | Balitbang            |
|          | Pengembangan sistem informasi manajemen IPTEK           | Meningkatkan interaksi yang tinggi antara agenda riset dan lembaga penelitian dan pengembangan dengan dunia  | 300,000           | 0.02%        | Balitbang            |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                                    | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN          |              | SKPD PENGAMPU   |
|----|--|--|-------------------|--------------|---|
|    |  |  | (Ribuan Rp)       | (Prosen)     |   |
| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5            | 6   |
| 6  | <b>Agama</b>   |  | <b>7,014,000</b>  | 0.55%        |   |
|    | Pelayanan kehidupan beragama                                 | Meningkatkan pelayanan dan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kehidupan beragama   | 5,350,000         | 0.42%        | Setda, Diskimtaru   |
|    | Peningkatan kualitas pelayanan haji                          | Meningkatkan pelayanan dan kemudahan calon haji dalam melaksanakan ibadah  | 1,264,000         | 0.10%        | Setda, KPBD   |
|    | Fasilitasi pendidikan agama                                  | Meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas keimanan dan ketaqwaan   | 400,000           | 0.03%        | Setda   |
|    | <b>C KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>                  |  | <b>98,434,687</b> | <b>7.72%</b> |   |
| 1  | <b>Kesehatan</b>   |  | <b>86,252,190</b> | <b>6.77%</b> |   |
|    | Lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat | Mewujudkan lingkungan hidup yang kondusif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.<br>Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan.<br>Memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.  | 6,500,000         | 0.51%        | Dinkes, setda   |
|    | Upaya pelayanan kesehatan                                    | 1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat diantaranya pengembangan Polindes menjadi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).<br>2. Meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan, serta untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak | 67,002,190        | 5.26%        | Dinkes, RSUD Moewardi, RSUD Margono Soekarjo, RSUD Tugu Rejo, RSUD Kelet, RSJ Klaten, Semarang, Surakarta |
|    | Pengawasan obat, makanan, minuman dan bahan berbahaya        | 1. Mengupayakan tersedianya pelayanan kefarmasian yang terjangkau, rasional dan berkesinambungan.  | 9,000,000         | 0.71%        | Dinkes  |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                     | TUJUAN PROGRAM  | ANGGARAN          |              | SKPD PENGAMPU                      |
|----|---|---|-------------------|--------------|------------------------------------|
|    |   |   | (Ribuan Rp)       | (Prosen)     |                                    |
| 1  | 2   | 3   | 4                 | 5            | 6                                  |
|    | Sumberdaya kesehatan                          | 2. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahan penggunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya.<br><br>Mengupayakan tersedianya tenaga kerja luar negeri, pembiayaan dan perbekalan kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, serta spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, berkesinambungan, terjangkau dan tepat waktu.   | 1,250,000         | 0.10%        | Dinkes                             |
|    | Perbaikan gizi masyarakat                     | Meningkatkan gizi masyarakat dalam rangka mendukung intelektualitas dan produktivitas sumberdaya manusia  | 1,500,000         | 0.12%        | Dinkes                             |
|    | Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan | Mendorong penyelenggaraan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Jawa Tengah sehat 2010, sesuai dengan Misi Jawa Tengah.  | 1,000,000         | 0.08%        | Dinkes                             |
| 2  | <b>Kesejahteraan Sosial</b>                   |   | <b>12,182,497</b> | <b>0.96%</b> |                                    |
|    | Pelayanan dan rehabilitasi sosial             | Mengembalikan dan melindungi fungsi sosial bagi warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat termasuk pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT)  | 4,965,200         | 0.39%        | Dinkesos                           |
|    | Peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan | 1. Menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam pelayanan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS),<br><br>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan fungsi dan perannya selaku mitra pemerintah dalam menangani PMKS, serta<br><br>3. Mengembangkan dan melestarikan sikap kerelawanan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat. | 2,605,000         | 0.20%        | Dinkesos, Setda, Kantor Perwakilan |

| No        | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM   | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN           |               | SKPD PENGAMPU   |
|-----------|---|--|--------------------|---------------|---|
|           |   |  | (Ribuan Rp)        | (Prosen)      |   |
| 1         | 2   | 3  | 4                  | 5             | 6   |
|           | Pengembangan kesejahteraan sosial   | Meningkatkan kesejahteraan sosial para PMKS agar dapat hidup layak dan bermartabat   | 749,800            | 0.06%         | Dinkesos  |
|           | Penanggulangan bencana alam   | 1. Meningkatkan kesiap siagaan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi bencana/ bencana alam secara cepat dan tepat.<br>2. Mewujudkan dan memulihkan fungsi sosial bagi para korban bencana/ bencana alam melalui berbagai bantuan dan penanganan. | 3,862,497          | 0.30%         | Dinkesos, Bakorlin I, II, III dan Badan Kesbanglinmas, Diskimtaru, dishubtel, Setda |
| <b>II</b> | <b>PEMBANGUNAN EKONOMI</b>  |  | <b>481,387,725</b> | <b>37.77%</b> |   |
| <b>A</b>  | <b>EKONOMI KERAKYATAN</b>   |  | <b>34,140,388</b>  | <b>2.68%</b>  |   |
| <b>1</b>  | <b>Pelayanan Koperasi, UKM, Perindustrian &amp; Perdagangan</b>                         |  | <b>34,140,388</b>  | <b>2.68%</b>  |   |
|           | Pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi koperasi dan UKM                 | Meningkatkan daya saing dalam memenuhi dan memasarkan hasil produksi koperasi.   | 1,100,000          | 0.09%         | Disyankop dan UKM   |
|           | Pengembangan struktur permodalan  | Meningkatkan akumulasi modal, meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal secara efektif dan efisien, mningkatkan akses permodalan  | 1,315,000          | 0.10%         | Disyankop dan UKM, Setda  |
|           | Pengembangan SDM dan kelembagaan usaha kecil mikro, Koperasi dan UKM                    | Meningkatkan dan mengembangkan SDM dan kelembagaan koperasi agar mampu bersaing secara kompetitif.   | 2,731,748          | 0.21%         | Disyankop dan UKM, Setda  |
|           | Pengembangan usaha kecil mikro, kop dan UKM berorientasi IPTEK                          | Meningkatkan kualitas, profesionalisme SDM pengelola Koperasi dan UKM, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing.  | 1,160,000          | 0.09%         | Disyankop dan UKM   |
|           | Pengembangan usaha kecil mikro, koperasi dan UKM berorientasi komoditas unggulan daerah | Memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang spesifik yang dapat dipertahankan kelangsungannya di daerah, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan daerah lainnya,  | 2,800,000          | 0.08%         | Disyankop dan UKM   |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                               | TUJUAN PROGRAM  | ANGGARAN    |          | SKPD PENGAMPU     |
|----|---|---|-------------|----------|-------------------|
|    |   |   | (Ribuan Rp) | (Prosen) |                   |
| 1  | 2   | 3   | 4           | 5        | 6                 |
|    | Pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha                | Memfasilitasi pengembangan KUMKM melalui pemanfaatan pola-pola kemitraan usaha yang ada.  | 11,875,144  | 0.93%    | Disyankop dan UKM |
|    | Pemberdayaan dan penataan basis produksi dan distribusi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang lebih efisien dan efektif</li> <li>2. Meningkatkan utilitasi kapasitas terpasang dan pertumbuhan investasi baru serta peningkatan basis produksi sector industri.</li> <li>3. Meningkatkan nilai tambah subsektor industri yang berbasis sumber daya alam yang mencakup kegiatan produksi pertanian dalam arti luas (perikanan, peternakan, perkebunan tanaman pangan dan kehutanan)</li> </ol> | 1,827,000   | 0.14%    | Disperin          |
|    | Perluasan dan Penguatan lembaga pendukung UKM           | Mendukung perkuatan daya saing, perluasan didalam penerapan standarisasi untuk produk-produk industri manufaktur.   | 3,379,748   | 0.27%    | Disperin          |
|    | Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                     | Mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Jawa Tengah serta meningkatkan peranan ekspor barang dan jasa dalam memacu pertumbuhan ekonomi.  | 420,000     | 0.03%    | Disperin          |
|    | Perluasan dan Penguatan lembaga pendukung UKM           | Mendukung perkuatan daya saing, perluasan didalam penerapan standarisasi untuk produk-produk industri manufaktur.   | 3,350,748   | 0.26%    | Dinas Perdagangan |
|    | Pengembangan Ekspor                                     | Mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Jawa Tengah serta meningkatkan peranan ekspor barang dan jasa dalam memacu pertumbuhan ekonomi.  | 4,181,000   | 0.33%    | Dinas Perdagangan |

| No       | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                 | TUJUAN PROGRAM  | ANGGARAN          |              | SKPD PENGAMPU                           |
|----------|---|---|-------------------|--------------|---|
|          |   |   | (Ribuan Rp)       | (Prosen)     |   |
| 1        | 2   | 3   | 4                 | 5            | 6                                       |
| <b>B</b> | <b>PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN</b> |   | <b>69,035,211</b> | <b>5.42%</b> |   |
| <b>1</b> | <b>Pertanian</b>                          |   | <b>46,649,135</b> |              |   |
|          | Pengembangan agribisnis                   | 1 Mengembangkan usaha pertanian agar efisien dan produktif menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional dan<br><br>2 Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDRB. | 23,130,879        | 1.81%        | BBMKP, Dispertan, Disbun, Disnak, Setda |
|          | Peningkatan ketahanan pangan              | 1 Meningkatkan ketersediaan pangan tingkat nasional, regional, rumah tangga yang cukup, aman dan halal.<br><br>2 Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat;<br><br>3 Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.   | 20,257,928        | 1.15%        | BBMKP, Dispertan, Disbun, Disnak, Setda |
|          | Peningkatan Kesejahteraan Petani          | Memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.   | 3,260,328         | 0.26%        | BBMKP, Dispertan, Disnak, Setda         |
| <b>2</b> | <b>Perikanan dan Kelautan</b>             |   | <b>14,898,860</b> | <b>1.17%</b> |   |
|          | Pengembangan perikanan budi daya          | Meningkatkan ketersediaan ikan dalam jumlah dan mutu yang cukup terjangkau bagi masyarakat melalui rehabilitasi/pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan produksi, produktivitas perbaikan distribusi   | 5,450,288         | 0.43%        | Diskanlut                               |
|          | Pengembangan perikanan tangkap            | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi produktif  | 4,642,435         | 0.36%        | Diskanlut                               |
|          | Pengembangan usaha perikanan              | Mengembangkan usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya dalam rangka menunjang kemandirian pengelolaan perikanan.  | 4,407,375         | 0.35%        | Diskanlut                               |

| No       | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                       | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN          |              | SKPD PENGAMPU |
|----------|---|--|-------------------|--------------|---------------|
|          |   |  | (Ribuan Rp)       | (Prosen)     |               |
| 1        | 2   | 3  | 4                 | 5            | 6             |
|          | Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan   | Membangun basis data informasi dan evaluasi sumberdaya kelautan yang memadai   | 398,762           | 0.03%        | Diskanlut     |
| <b>3</b> | <b>Kehutanan</b>                                |  | <b>7,487,216</b>  | <b>0.59%</b> |               |
|          | Rehabilitasi hutan dan lahan                    | Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dengan menggunakan pendekatan daerah aliran sungai (DAS) dan partisipasi masyarakat, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung | 3,103,366         | 0.24%        | Dishut        |
|          | Perlindungan hutan dan konservasi alam          | Mencegah, membatasi dan mengurangi kerusakan fisik hutan, termasuk kawasan dan hasil-hasilnya  | 1,671,980         | 0.13%        | Dishut        |
|          | Pemantapan prakondisi pengelolaan hutan         | Memantapkan proses perencanaan kehutanan secara berkelanjutan, dengan didukung oleh ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat, baik mengenai potensi, struktur maupun komposisi.   | 468,970           | 0.04%        | Dishut        |
|          | Optimalisasi pemanfaatan hutan                  | Menjaga pelestarian dan pengelolaan sumberdaya hutan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.  | 856,380           | 0.07%        | Dishut        |
|          | Pengembangan kelembagaan                        | Menata dan memantapkan kelembagaan melalui keterpaduan program, sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, penyiapan peraturan perundangan dan peralatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.                          | 1,386,520         | 0.08%        |               |
| <b>C</b> | <b>INVESTASI, KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH</b>  |  | <b>24,998,007</b> | <b>1.96%</b> |               |
| <b>1</b> | <b>Penanaman Modal</b>                          |  | <b>24,998,007</b> | <b>1.96%</b> |               |
|          | Perencanaan dan evaluasi pengembangan investasi | Menyusun perencanaan dan evaluasi terhadap permasalahan pengembangan investasi   | 1,430,000         | 0.11%        | BPM           |

| No       | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM  | TUJUAN PROGRAM  | ANGGARAN         |              | SKPD PENGAMPU   |
|----------|--|---|------------------|--------------|-----------------|
|          |  |   | (Ribuan Rp)      | (Prosen)     |                 |
| 1        | 2  | 3   | 4                | 5            | 6               |
|          | Promosi dan pelayanan perijinan investasi                        | Meningkatkan aktivitas untuk menarik minat investor dan memberikan pelayanan perijinan investasi  | 2,001,760        | 0.16%        | BPM             |
|          | Kerjasama investasi  | Memfasilitasi aktivitas kerjasama investasi baik antar Kab/Kota, Provinsi dan lembaga asing negara lain.  | 950,000          | 0.07%        | BPM             |
|          | Pengkajian dan pengendalian investasi                            | Melakukan kajian terhadap penelitian potensi daerah serta melakukan pengendalian, pengawasan pelaksanaan investasi dan penggunaan fasilitas yang telah dimanfaatkan agar sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat | 935,000          | 0.05%        | BPM             |
|          | Optimalisasi pengelolaan aset daerah                             | Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari obyek-obyek pendapatan yang ada serta obyek-obyek pendapatan yang baru.  | 100,000          | 0.01%        | KPBD            |
|          | Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem dan prosedur pelayanan.   | 13,767,666       | 1.08%        | Dipenda         |
|          | Efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah             | Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana, antara lain berupa penyediaan tanah, Renovasi Gedung Kantor, penyempurnaan Kantor UPPD dan SAMSAT, Inventarisir kantor serta penyediaan jaringan program aplikasi komputer                                      | 5,813,581        | 0.46%        | Setda, Kasda    |
| <b>D</b> | <b>PARIWISATA</b>  |   | <b>8,862,127</b> |              |                 |
| <b>1</b> | <b>Pariwisata</b>  |   | <b>8,862,127</b> | <b>0.70%</b> |                 |
|          | Promosi pariwisata   | Meningkatkan Jaringan Pasar dan Promosi secara Lintas Wilayah   | 1,870,000        | 0.15%        | Disparta        |
|          | Pengembangan produk  | Meningkatkan potensi Keunikan Lokal ,Budaya Masyarakat dan Alam   | 3,392,000        | 0.27%        | Disparta        |
|          | Perencanaan dan pengembangan pariwisata                          | Mengembangkan Jaringan Aksesibilitas dan Kerjasama Antar Kawasan Wisata   | 3,600,127        | 0.28%        | Disparta, setda |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                                  | TUJUAN PROGRAM  | ANGGARAN           |               | SKPD PENGAMPU        |
|----|--|---|--------------------|---------------|----------------------|
|    |  |   | (Ribuan Rp)        | (Prosen)      |                      |
| 1  | 2  | 3   | 4                  | 5             | 6                    |
| E  | <b>INFRASTRUKTUR (PERHUBUNGAN, PSDA/IRIGASI DAN JALAN)</b> |   | <b>344,351,992</b> | <b>27.02%</b> |                      |
| 1  | <b>Perhubungan</b>   |   | <b>21,706,145</b>  | <b>1.70%</b>  |                      |
|    | Pengembangan perhubungan darat                             | Menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan melalui peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat  | 10,414,397         | 0.82%         | Dishub, DLLAJ, setda |
|    | Pengembangan perhubungan laut                              | Menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan pelayaran melalui peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan   | 1,627,748          | 0.09%         | Dishub               |
|    | Pengembangan perhubungan udara                             | Mendukung sarana dan prasarana perhubungan udara yang memadai melalui peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan udara serta mampu menunjang distribusi barang dan penumpang antar pulau yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan memberi   | 7,150,000          | 0.56%         | Dishub               |
|    | Pengembangan Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR      | Menciptakan kelancaran, ketertiban dan keamanan melalui peningkatan sarana dan prasarana Pos, Telekomunikasi, meteorologi, klimatologi, geofisika dan SAR   | 934,000            | 0.07%         | Dishub               |
|    | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                    | Memberikan arahan dan strategi bagi penyusunan kebijakan pembangunan perhubungan secara berkesinambungan baik darat, laut maupun udara  | 1,580,000          | 0.12%         | Dishub               |
| 2  | <b>Sumberdaya Air dan Irigasi</b>                          |   | <b>40,766,748</b>  | <b>3.20%</b>  |                      |
|    | Penyediaan dan Pengelolaan air baku                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengamankan aset prasarana dan sarana sumber daya air</li> <li>2 Mengimplementasikan konservasi waduk melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar waduk dan sumber air lainnya</li> <li>3 Membangun dan rehab serta OP waduk, check dam dalam upaya menjaga sumber air</li> </ol> | 2,625,000          | 0.21%         | Dinas PSDA           |

| No       | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM  | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN           |               | SKPD PENGAMPU    |
|----------|--|--|--------------------|---------------|------------------|
|          |  |  | (Ribuan Rp)        | (Prosen)      |                  |
| 1        | 2  | 3  | 4                  | 5             | 6                |
|          |  | 4 Membersihkan enceng gondok dengan pola partisipasi, upaya peningkatan tampungan Rawa Pening, upaya efektivitas Forum Rembug Rawa   |                    |               |                  |
|          | Pengembangan , pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan Sumber air lainnya     | Meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumberdaya air dan menjaga kelestarian fungsi sumberdaya air guna mensejahterakan masyarakat  | 6,878,967          | 0.54%         | Dinas PSDA       |
|          | Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Mendukung upaya mewujudkan kemandirian di bidang ketahanan pangan dengan meningkatkan fungsi layanan irigasi dan perans erta Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan peningkatan partisipasi masyarakat. | 11,666,706         | 0.92%         | Dinas PSDA       |
|          | Pengendalian banjir dan pengamanan pantai  | Mengurangi/menekan kerugian dari ancaman banjir dan daya rusak air pada kawasan strategis dan sentra produksi serta kawasan pantai/pesisir.  | 19,596,075         | 1.54%         | Dinas PSDA       |
| <b>3</b> | <b>Prasarana Jalan</b>   |  | <b>281,879,099</b> | <b>22.11%</b> |                  |
|          | Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan                                       | Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi yang memadai/mantap untuk melayani arus lalu lintas.  | 104,798,200        | 8.22%         | Dinas Bina Marga |
|          | Peningkatan jalan dan jembatan   | Meningkatkan kondisi struktur dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan   | 177,080,899        | 13.89%        | Dinas Bina Marga |

| No  | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                                | TUJUAN PROGRAM  | ANGGARAN           |               | SKPD PENGAMPU  |
|-----|--|---|--------------------|---------------|----------------|
|     |  |   | (Ribuan Rp)        | (Prosen)      |                |
| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5             | 6              |
| III | <b>PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH</b>           |   | <b>137,062,327</b> | <b>10.75%</b> |                |
| A   | <b>PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH</b>                      |   | <b>125,065,392</b> | <b>9.81%</b>  |                |
| 1   | <b>Aparatur Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah</b>     |   | <b>125,065,392</b> | <b>9.81%</b>  |                |
|     | Peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah daerah        | Meningkatkan kualitas pengetahuan, profesionalisme dan ketrampilan serta dedikasi, etika dan moral aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.  | 14,085,447         | 1.11%         | Seluruh SKPD   |
|     | Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan            | Meningkatkan sarana pemerintahan sesuai dengan analisis kebutuhan guna mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan.   | 56,216,281         | 4.41%         | Seluruh SKPD   |
|     | Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan                 | Menganalisis dan mengevaluasi kelembagaan SKPD dan UPTD yang ditindaklanjuti dengan penjabaran tupoksi masing-masing serta fasilitasi kelembagaan SKPD  | 458,625            | 0.04%         | Setda          |
|     | Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan | 1 Meningkatkan efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan yang mantap<br>2 Meningkatkan kualitas perencanaan daerah, regional dan sektoral serta terpadunya program-program pembangunan daerah<br>3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program<br>4 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.<br>5 Mengembangkan akses informasi komunikasi dan media massa | 51,750,240         | 4.06%         | Seluruh SKPD   |
|     | Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah                   | Memantapkan dan meningkatkan efektivitas serta optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan kewenangan serta memperhatikan seluruh potensi daerah.  | 540,000            | 0.04%         | Setda          |
|     | Peningkatan kerjasama antar daerah                       | Meningkatkan hubungan dan kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan otda  | 2,014,799          | 0.16%         | Biro Kerjasama |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                                    | TUJUAN PROGRAM  | ANGGARAN               |                | SKPD PENGAMPU    |
|----|--|---|------------------------|----------------|------------------|
|    |  |   | (Ribuan Rp)            | (Prosen)       |                  |
| 1  | 2  | 3   | 4                      | 5              | 6                |
| B  | <b>PEMBERDAYAAN (MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA)</b> |   |                        |                |                  |
|    | <b>1 Pemberdayaan Masyarakat</b>                             |   | <b>11,996,935</b>      | <b>0.94%</b>   | Bapermas         |
|    | Peningkatan partisipasi masyarakat                           | 1 Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui perbaikan perumahan dan penataan lingkungan<br>2 Penguatan program PPK<br>3 Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi Posyandu<br>4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana alokasi desa/kelurahan<br>5 Penguatan peran aktif masyarakat<br>6 Penyusunan modul dan model pelatihan fasilitator pemberdayaan masyarakat<br>7 Evaluasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan | 6,417,797<br>2,050,000 | 0.50%<br>0.16% |                  |
|    | Fasilitasi Pengembangan Masyarakat                           | 1 Pemantapan koordinasi dan keterpaduan program pemberdayaan masyarakat<br>2 Pengembangan sistem pendataan pemberdayaan masyarakat<br>3 Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berdasarkan typelogi komunitas<br>4 Revitalisasi pranata sosialisasi dalam pembangunan   | 1,350,000              | 0.11%          | Bapermas         |
|    | Penguatan Kelembagaan Masyarakat                             | 1 Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan lumbung pangan<br>2 Penguatan perencanaan dari bawah melalui Musrenbangdes / kel<br>3 Penguatan lembaga kemasayarakatan melalui model pemberdayaan masyarakat<br>4 Pengembangan model budaya usaha  | 3,017,797              | 0.24%          | Bapermas<br>BIKK |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM   | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN               |                | SKPD PENGAMPU  |
|----|---|--|------------------------|----------------|--|
|    |   |  | (Ribuan Rp)            | (Prosen)       |  |
| 1  | 2   | 3  | 4                      | 5              | 6  |
| 2  | <b>Pemberdayaan Perempuan</b><br>Peningkatan kualitas hidup perempuan           | Meningkatkan kondisi kualitas kesejahteraan perempuan serta menjawab kebutuhan prktis perempuan, dan merupakan upaya-upaya afirmasi.   | 5,065,280<br>2,240,062 | 0.40%<br>0.18% | Bapedal<br>Dinas P dan K<br>Dinas Pariwisata<br>Dinas Yankop dan UKM<br>Dinas Perdagangan<br>Bakorlin III<br>RSU Tugu Rejo<br>Disnakertrans<br>Setda |
|    | Pelebagaan pengarusutamaan gender   | Menginternalisasikan strategi pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan status. Kedudukan partisipasi perempuan dan menjawab kebutuhan strategis gender, dengan memperhatikan aspirasi, pengalaman, kebutuhan dan masalah yan | 2,825,218              | 0.22%          | Bapermas<br>Dinas P dan K<br>Setda<br>Dinkesos<br>Blkk   |
| 3  | <b>Anak dan Remaja</b><br>Pemberdayaan anak dan remaja                          | Memperkuat partisipasi masyarakat, anak dan remaja serta pengembangan sistem perlindungan anak, fasilitasi pembentukan forum anak dan pengembangan model uapaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dan perdagangan anak.sosialiasi perlindungan hak- | 513,858<br>513,858     | 0.04%<br>0.04% | Setda<br>Disnakertrans   |
| IV | <b>PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBERDAYA KELAUTAN</b>    |  | 33,438,166             | 2.62%          |  |
| A  | <b>PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBERDAYA KELAUTAN</b>    |  | 11,578,734             | 0.91%          |  |
| 1  | <b>Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup.</b><br>Pengendalian pencemaran lingkungan | Meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan dampak pencemaran lingkungan pada sumber penyebab atau obyek terkena dampak terutamapencemaran udaralimbah padat cair dan bahan beracunberbahaya (B3)   | 6,066,748<br>1,600,000 | 0.48%<br>0.13% | Bapedal  |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM   | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN         |              | SKPD PENGAMPU                 |
|----|---|--|------------------|--------------|-------------------------------|
|    |   |  | (Ribuan Rp)      | (Prosen)     |                               |
| 1  | 2   | 3  | 4                | 5            | 6                             |
|    | Pengelolaan Penegakan hukum lingkungan  | Mengembangkan/menyempurnakan dan mensosialisasikan perangkat hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penyelesaian / penanganan   | 290,000          | 0.02%        | Bapedal                       |
|    | Pengelolaan lingkungan alam   | Meningkatkan upaya pengendalian, rehabilitasi, konservasi dan preservasi sumber daya hayati, air, tanah, hutan dan eko sistemnya   | 1,901,748        | 0.15%        | Bapedal<br>Setda<br>Pertamben |
|    | Pengelolaan lingkungan sosial   | Meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab aparat / petugas, peran serta masyarakat, dan kerjasama kemitraan antar pihak dalam memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi sosial budaya dan lingkungan.   | 550,000          | 0.04%        | Bapedal<br>Bapermas           |
|    | Pengelolaan lingkungan buatan   | Meningkatkan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kerusakan daya tampung/ dukung lingkungan yang menjadi ruang bagi kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat pada lingkungan perkotaan, lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya | 1,550,000        | 0.12%        | Bapedal                       |
|    | Pengembangan basis data lingkungan  | Membangun data base informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mewadahi serta mudah di akses masyarakat swasta dan lembaga Pemerintah dalam mnedukung pengelolaan lingkungan hidup   | 175,000          | 0.01%        | Bapedal                       |
|    | <b>2 Pertambangan dan Energi</b>  |  | <b>3,781,748</b> | <b>0.30%</b> |                               |
|    | Pengembangan Investasi usaha pertambangan                                       | Meningkatkan kerjasama dan promosi pertambangan dan air tanah  | 510,000          | 0.04%        | Distamben                     |
|    | Penelitian dan Pengembangan Potensi dan Teknologi Geologi, Pertambangan dan ABT | Menginventarisasi, evaluasi, eksploitasi dan pengembangan teknologi geologi dan air bawah tanah  | 711,748          | 0.06%        | Distamben                     |
|    | Peningkatan dan pengembang sistem was dan pengend geologi, pertamb dan ABT      | Menginventarisasi dan mengevaluasi lingkungan geologi, sosialisasi dan pemantauan daerah longsor serta pengawasan dan pengendalian usaha air tanah   | 1,375,000        | 0.11%        | Distamben                     |

| No       | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM   | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN          |              | SKPD PENGAMPU     |
|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|
|          |   |  | (Ribuan Rp)       | (Prosen)     |                   |
| 1        | 2   | 3  | 4                 | 5            | 6                 |
|          | Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum bidang pertambangan                                | Mengembangkan sarana dan prasarana, bimbingan teknis   | 100,000           | 0.01%        | Distamben         |
|          | Pengembangan sumber tenaga listrik  | Mengembangkan sumber energi mikrohidro, mensinkronkan dan mengevaluasi perencanaan ketenagalistrikan daerah.                                   | 175,000           | 0.01%        | Distamben         |
|          | Pengembangan energi alternatif  | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif dan pengelolaan energi daerah  | 270,000           | 0.02%        | Distamben         |
|          | Pendayagunaan sumur migas marginal/tua  | Meningkatkan hasil dan mengembangkan sumur migas tua / marginal  | 190,000           | 0.01%        | Distamben         |
|          | Pembinaan Was dan Pengendalian Usaha Jasa Ketenagalistrikan & Usaha Penunjang Migas | Mengadakan pengawasan ketenagalistrikan, pemantauan SPBU dan pangkalan minyak, K3 dan niaga BBM  | 450,000           | 0.04%        | Distamben         |
| <b>3</b> | <b>Sumberdaya kelautan</b>  |  | <b>1,730,238</b>  | <b>0.14%</b> |                   |
|          | Inventarisasi dan evaluasi sumber daya kelautan                                     | Membangun basis data informasi dan evaluasi sumber daya kelautan yang memadai untuk mendukung pendayagunaan sumber daya kelautan               | 440,238           | 0.03%        | Diskanlut         |
|          | Pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan                         | Meningkatkan upaya pengawasan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan untuk mencegah, mengendalikan dan memulihkan kerusakan eko sistem | 1,290,000         | 0.10%        | Diskanlut Bapedal |
| <b>B</b> | <b>PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN</b>   |  | <b>21,859,432</b> | <b>1.71%</b> |                   |
| <b>1</b> | <b>Pentaan Ruang dan Pertanahan</b>   |  | <b>2,929,432</b>  | <b>0.23%</b> |                   |
|          | Peningkatan perencanaan tata ruang  | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rencana tata ruang tindaklanjut dan penjabaran teknis RTRWP   | 900,000           | 0.07%        | Diskimtaru        |
|          | Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelayanan dalam penataan ruang                 | Meningkatkan pemhaman masyarakat dan kemampuan aparaturn pemerintah dalam penataan ruang   | 625,000           | 0.05%        | Diskimtaru        |
|          | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang   | Meningkatkan kualitas dan kapasitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di masyarakat   | 300,000           | 0.02%        | Diskimtaru        |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM  | TUJUAN PROGRAM   | ANGGARAN          |              | SKPD PENGAMPU                                     |
|----|--|--|-------------------|--------------|---|
|    |  |  | (Ribuan Rp)       | (Prosen)     |   |
| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5            | 6   |
|    | Optimalisasi penataan dan pengendalian pertanahan lintas kab/kota                  | Mendukung optimalisasi penataan, pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah berdasarkan RTR serta mewujudkan kepastian hak atas tanah dilintas Kabupaten/Kota  | 1,104,432         | 0.09%        | Bapedal<br>Diskimtaru<br>Dinas Kehutanan<br>Setda |
| 2  | <b>Sub Bidang Pembangunan Perwilayahan</b>   |  | <b>18,930,000</b> | <b>1.49%</b> |   |
|    | Peningkatan keterpaduan dan kerjasama pengelolaan pembangunan perwilayahan         | Meningkatkan kemampuan dan pemahaman pelaku pembangunan dalam keterpaduan kerjasama dan peran serta pada pengelolaan pembangunan perwilayahan antar sektor pembangunan antar Provinsi / kabupaten/Kota dan | 830,000           | 0.07%        | Diskimtaru<br>Distamben                           |
|    | Pengembangan pengelolaan pembangunan perwilayahan                                  | Meningkatkan pengembangan kegiatan usaha pada sentra-sentra produksi yang ada dan atau potensial baru serta mengoptimalkan dan mengembangkan perencanaan   | 2,900,000         | 0.23%        | Diskimtaru  |
|    | Penguatan dan dukungan penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan | Mendukung dan memfasilitasi penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan oleh Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian suatu sistem wilayah  | 12,900,000        | 1.01%        | Diskimtaru<br>Bapermas<br>Setda                   |
|    | Pemantapan, peningkatan dan pengembangan Sarpras wilayah                           | Memantapkan dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah mendukung potensi unggulan wilayah pada titik-titik potensial terutama sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.                           | 2,300,000         | 0.18%        | Diskimtaru  |
| V  | <b>PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN TIBMAS</b>                             |  | <b>15,208,980</b> | <b>1.19%</b> |   |
| A  | <b>POLITIK, HUKUM DAN HAM, KEMAMAN DAN TIBMAS</b>                                  |  | <b>15,208,980</b> | <b>1.19%</b> |   |
| 1  | <b>Politik, Hukum dan HAM dan Kamtibmas</b>  |  | <b>15,208,980</b> | <b>1.19%</b> |   |
|    | Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat                               | Mengembangkan kehidupan demokratisasi di daerah kepada seluruh komponen masyarakat yang merupakan bagian paling strategis dalam rangka pendidikan politik rakyat yang partisipatif, santun dan bermartabat | 1,630,000         | 0.13%        | Badan Kesbanglinmas                               |

| No | BIDANG/SUB BIDANG/PROGRAM                                | TUJUAN PROGRAM  | ANGGARAN             |                | SKPD PENGAMPU             |
|----|--|---|----------------------|----------------|---------------------------|
|    |  |   | (Ribuan Rp)          | (Prosen)       |                           |
| 1  | 2  | 3   | 4                    | 5              | 6                         |
|    | Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dan HAM        | Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi aparaturnya maupun masyarakat dalam rangka menciptakan budaya hukum yang baik  | 1,202,094            | 0.09%          | Setda<br>Kantor Satpol PP |
|    | Penyusunan dan pembaharuan produk-produk hukum di daerah | Mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supermasi hukum terutama penyempurnaan dan pembaharuan produk-produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah | 1,204,166            | 0.09%          | Setda                     |
|    | Peningkatan Solidaritas persatuan dan kesatuan bangsa    | Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa di seluruh jajaran aparaturnya serta tingkatan maupun komponen masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya   | 6,572,500            | 0.52%          | Badan Kesbanglinmas       |
|    | Peningkatan keamanan ketertiban masyarakat               | Mewujudkan situasi kemandirian dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta meningkatkan kemampuan pengamanan melalui deteksi dini terhadap segala gangguan dan ancaman kamtibmas  | 4,600,220            | 0.36%          | Kantor Satpol PP          |
|    |  |   | <b>1,274,624,307</b> | <b>100.00%</b> |                           |

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO